

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024. Hal ini dikarenakan pengungkapan CSR pada perusahaan LQ45 lebih didorong oleh kewajiban kepatuhan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas serta tuntutan legitimasi sosial dari publik dan pemangku kepentingan, bukan sebagai bagian dari strategi keuangan untuk menekan beban pajak. Dengan kata lain, keputusan perusahaan mengungkapkan aktivitas sosialnya dan keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajaknya berjalan pada dua ranah pertimbangan yang berbeda dan tidak saling memengaruhi satu sama lain.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024. Hal ini dikarenakan perusahaan berskala besar yang tergabung dalam indeks LQ45 justru menghadapi sorotan publik, regulator, dan investor yang jauh lebih ketat dibandingkan perusahaan kecil. Besarnya risiko reputasi dan sanksi hukum apabila praktik penghindaran pajak terungkap membuat

perusahaan besar cenderung lebih memilih untuk mengalokasikan sumber dayanya guna mendukung kestabilan operasional dan menjaga kepercayaan pasar modal, dibandingkan memanfaatkan kapasitasnya untuk merekayasa kebijakan perpajakan.

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 di BEI periode 2021–2024. Proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen masih tergolong kecil sehingga belum cukup memberikan kekuatan pengendalian yang nyata bagi manajer untuk memengaruhi arah kebijakan perpajakan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah yang berlaku, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen *CSR Disclosure Annexure-A* yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan 30 item pengungkapan secara seragam pada seluruh perusahaan sampel, padahal karakteristik dan relevansi item tersebut berbeda-beda antarsektor usaha. Sebagai contoh, item terkait pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi lebih relevan dan cenderung diungkapkan secara ekstensif oleh perusahaan sektor pertambangan dan energi, sedangkan bagi perusahaan sektor perbankan atau telekomunikasi, item tersebut kurang relevan dengan aktivitas operasionalnya sehingga jarang diungkapkan. Kondisi heterogenitas

ini menyebabkan skor CSR yang dihasilkan berpotensi kurang mencerminkan perbandingan yang setara antarsektor usaha yang berbeda.

2. Penelitian ini mengukur ukuran perusahaan hanya melalui logaritma natural dari total aset, tanpa mempertimbangkan proksi lain seperti total penjualan atau kapitalisasi pasar. Padahal, khusus pada sampel penelitian ini terdapat perbedaan karakteristik struktur aset yang cukup mencolok antara perusahaan sektor perbankan (BBCA, BBRI, BMRI, BBNI) yang memang secara alami memiliki total aset sangat besar akibat pos aset keuangan seperti kredit dan surat berharga, dengan perusahaan sektor riil seperti pertambangan atau manufaktur. Kondisi ini menyebabkan proksi total aset kurang dapat menggambarkan skala usaha secara setara antarsektor yang memiliki struktur neraca yang berbeda secara fundamental.
3. Keterbatasan cakupan kepemilikan manajerial. Data kepemilikan manajerial dalam penelitian ini hanya mencatat kepemilikan saham langsung yang dilaporkan atas nama pribadi direksi dan komisaris pada laporan tahunan. Penelitian ini tidak menelusuri kemungkinan kepemilikan tidak langsung, misalnya saham yang dikuasai manajemen melalui perusahaan afiliasi atau pihak nominee (*nominee shareholder*), yang secara praktik cukup umum digunakan dalam struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia. Akibatnya, angka kepemilikan manajerial yang digunakan dalam penelitian berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan kepentingan finansial manajemen dalam perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pengungkapan CSR secara menyeluruh dan substantif pada seluruh dimensi pedoman *Annexure-A*, tidak hanya berfokus pada dimensi yang secara langsung relevan dengan sektor usahanya. Hal ini bertujuan agar pengungkapan CSR dapat mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih komprehensif, seragam, dan konsisten dengan prinsip kepatuhan perpajakan perusahaan.
2. Investor disarankan untuk tidak menjadikan proporsi kepemilikan manajerial sebagai indikator utama dalam menilai risiko agresivitas pajak suatu perusahaan. Investor sebaiknya lebih mempertimbangkan struktur kepemilikan mayoritas serta kualitas pengawasan komisaris independen yang secara riil memiliki kekuatan suara (*voting power*) untuk menentukan arah kebijakan pajak perusahaan.
3. Keterbatasan ketersediaan informasi dalam penelitian ini memberikan implikasi bagi penelitian selanjutnya untuk menelusuri data kepemilikan saham tidak langsung (*beneficial ownership*) agar dapat mengukur kekuatan tata kelola manajerial secara lebih utuh. Selain itu, terdapat implikasi metodologis untuk menggunakan proksi pengukuran agresivitas pajak alternatif selain ETR (seperti *Cash ETR* atau *Book Tax Difference*) agar penelitian lain dapat menangkap celah praktik perpajakan yang lebih komprehensif.